



# Jurnal Penelitian

# POLITIK

Vol.13, No.1, Juni 2016

## KOMUNITAS ASEAN DAN TANTANGAN KE DEPAN

- Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pencapaian *Cybersecurity* melalui *ASEAN Regional Forum on Cybersecurity Initiatives*
- Membaca “PHK Massal”: Rantai Nilai Industri Elektronik, MEA, dan Tantangan Bagi Gerakan Buruh di Indonesia
- Transformasi Ruang dan Partisipasi *Stakeholders*: Memahami Keterlibatan Masyarakat Sipil dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia dalam Proses Regionalisme ASEAN Pasca-2003
- Ketahanan Sosial Warga Perbatasan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN: Studi di Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat

### RESUME PENELITIAN

- Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru
- Problematika Kerja Sama Perbatasan Sepanjang Sungai Mekong antara Tiongkok dan ASEAN Bagian Utara
- Strategi Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN

### REVIEW BUKU

- Neotradisionalisme dan Distopianisme: Tinjauan atas Tiga Buku Robert D. Kaplan

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 13	No. 1	Hlm. 1-143	Jakarta, Juni 2016	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	------------	-----------------------	-------------------

**Jurnal  
Penelitian Politik**



**Mitra Bestari**

Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam, serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2P-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2P-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2P-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)  
Prof. Dr. Bahtiar Effendy (*Ahli Kajian Politik Islam*)  
Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti (*Ahli Kajian Pertahanan dan Hubungan Internasional*)  
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)  
Prof. Dr. Dede Mariana (*Ahli Kajian Politik Lokal dan Pemerintahan*)  
Dr. C.P.F Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN, Eropa*)  
Dr. Nurliah Nurdin (*Ahli Kajian Pemilu dan Pemerintahan*)  
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)  
Nico Harjanto, Ph.D (*Ahli Kajian Perbandingan Politik*)

**Penanggung Jawab**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

**Pemimpin Redaksi**

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si

**Dewan Redaksi**

Adriana Elisabeth, Ph.D (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)  
Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)  
Kurniawati Hastuti Dewi, Ph.D (*Ahli Kajian Politik Lokal, Gender dan Politik*)  
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)

**Redaksi Pelaksana**

Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)  
Athiqah Nur Alami, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)

**Sekretaris Redaksi**

Hayati Nufus, S.Hum  
Esty Ekawati, S.IP., M.IP  
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

**Produksi dan Sirkulasi**

Adiyatnika, A.Md  
Prayogo, S.Kom

**Alamat Redaksi**

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710  
Telp/Faks. (021) 520 7118, E-mail: penerbitan.p2p@gmail.com  
Website: www.politik.lipi.go.id

**ISSN**

1829-8001

## DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Catatan Redaksi	iii-v
Artikel	
• <b>Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pencapaian Cybersecurity melalui ASEAN Regional Forum on Cybersecurity Initiatives</b> <i>David Putra Setyawan dan Arwin Datumaya Wahyudi Sumari</i>	1-20
• <b>Membaca “PHK Massal”: Rantai Nilai Industri Elektronik, MEA, dan Tantangan Bagi Gerakan Buruh di Indonesia</b> <i>Fathimah Fildzah Izzati</i>	21-32
• <b>Transformasi Ruang dan Partisipasi Stakeholders: Memahami Keterlibatan Masyarakat Sipil dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia dalam Proses Regionalisme ASEAN Pasca-2003</b> <i>Ahmad Rizky Mardhatillah Umar</i>	33-52
• <b>Ketahanan Sosial Warga Perbatasan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN: Studi di Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat</b> <i>Sandy Nur Ikfal Raharjo</i>	53-68
Resume Penelitian	
• <b>Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru</b> <i>Diandra Megaputri Mengko, dkk</i>	69-82
• <b>Problematika Kerja Sama Perbatasan Sepanjang Sungai Mekong antara Tiongkok dan ASEAN Bagian Utara</b> <i>Awani Irewati, dkk</i>	83-104
• <b>Strategi Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN</b> <i>Khanisa, dkk</i>	105-118
Review Buku	
• <b>Neotradisionalisme dan Distopianisme: Tinjauan atas Tiga Buku Robert D. Kaplan</b> <i>Nanto Sriyanto</i>	119-136
Tentang Penulis	137-138
Pedoman Penulisan	141-145

## CATATAN REDAKSI

Tahun 2016 menjadi tahun yang sangat penting bagi Indonesia dan ASEAN, karenan di permulaan tahun ini Komunitas ASEAN resmi dijalankan. Pembentukan komunitas ini disepakati oleh sepuluh negara anggota ASEAN untuk mewujudkan cita-cita integrasi di antara mereka. Integrasi di kawasan ini juga diharapkan dapat membuka pintu yang lebih lebar bagi peluang kerja sama di tingkat ASEAN, sehingga dapat membawa peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di kawasan ini. Selain peningkatan kesejahteraan di kawasan, hal lain yang juga ingin dicapai oleh ASEAN adalah membangun komunitas yang menguatkan solidaritas di antara anggotanya dan lebih bersifat people-oriented. Di tengah dinamika politik dan ekonomi di tingkat internasional yang semakin kompleks, Komunitas ASEAN diharapkan mampu mendorong sepuluh anggotanya untuk meningkatkan daya saing mereka miliki, sehingga ASEAN siap menghadapi tantangan regional dan internasional yang ada. Dalam membangun komunitas yang dicita-citakan, dibentuklah tiga pilar utama, yaitu: Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN.

Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN diharapkan mampu menjaga ASEAN untuk tetap berkomitmen dalam memelihara stabilitas dan keamanan di kawasan. Hal ini diperlukan agar ASEAN dapat membangun lingkungan politik yang harmonis yang mampu menghadapi ancaman-ancaman dari luar ataupun potensi konflik di dalam tubuh ASEAN sendiri. Sementara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, ASEAN membangun Komunitas Ekonomi ASEAN dengan tujuan untuk mendorong pergerakan roda ekonomi dan perdagangan antarnegara anggota ASEAN yang mampu bersaing secara sehat. Peningkatan daya saing produk-produk dari masing-masing negara anggota ASEAN diperlukan agar ASEAN dapat mengambil peluang yang besar

dari perdagangan bebas di dunia internasional. Komunitas Ekonomi ASEAN atau yang juga dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diharapkan dapat memperkecil gap perkembangan ekonomi di antara negara anggota ASEAN dan mampu menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh anggota ASEAN. Selain peningkatan kesejahteraan ekonomi, ASEAN juga mengharapkan terbentuknya masyarakat yang memiliki solidaritas dan rasa kebersamaan yang kuat terhadap ASEAN. Untuk itulah dibentuk Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Kedekatan geografis diharapkan tidak hanya mampu menjalin keterhubungan secara fisik di ASEAN, namun juga mampu menjalin keterhubungan di antara masyarakat di kawasan Asia Tenggara.

Implementasi tiga pilar Komunitas ASEAN pada dasarnya akan membawa peluang yang sangat besar bagi ASEAN. Akan tetapi, pemberlakuan Komunitas ASEAN juga harus menghadapi beberapa tantangan yang muncul baik dari dalam tubuh ASEAN ataupun dari luar. Perbedaan tingkat kemajuan di antara negara anggota merupakan tantangan internal yang harus dihadapi ASEAN. Perbedaan tingkat perkembangan ekonomi negara-negara anggota ASEAN dapat menjadi ganjalan integrasi yang ingin dicapai oleh ASEAN, terutama dalam sektor ekonomi. Selain itu, perbedaan kesiapan masing-masing negara dalam menghadapi Komunitas ASEAN juga menjadi tantangan bagi ASEAN. Sementara tantangan dari luar misalnya adalah tantangan yang muncul dari konstelasi politik internasional yang masih didominasi oleh kekuatan-keuatan negara besar, seperti Amerika dan Tiongkok. Sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan empat negara anggota ASEAN (Brunei, Filipina, Malaysia, dan Vietnam) dan Tiongkok apabila tidak dapat dikelola dengan baik dapat menjadi ganjalan bagi kestabilan di kawasan ini.

Bagi Indonesia, Komunitas ASEAN juga membuka peluang yang besar, terutama dalam mendorong peningkatan daya saing yang dimiliki oleh Indonesia. Namun, dilihat dari kesiapannya, peluang yang ada tidak dapat diambil secara optimal oleh Indonesia apabila pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia masih belum memenuhi harapan. Kesiapan sumber daya manusia, tata kelola, pembangunan infrastruktur, kerangka hukum, serta kebijakan pemerintah yang mendorong partisipasi Indonesia dalam Komunitas ASEAN dirasa masih kurang. Dari segi sosial masyarakat, Indonesia masih harus menghadapi kenyataan bahwa kesadaran masyarakat akan Komunitas ASEAN masih rendah. Belum banyak masyarakat yang menyadari arti penting Komunitas ASEAN atau ASEAN sendiri bagi Indonesia. Melihat kenyataan ini, *Jurnal Penelitian Politik* kali ini mengangkat tema “Komunitas ASEAN dan Tantangan ke Depan” untuk melihat lebih lanjut sejauh mana implementasi Komunitas ASEAN akan membawa dampak bagi ASEAN ataupun Indonesia, dan tantangan apa saja yang akan dihadapi di masa mendatang. *Jurnal Penelitian Politik* edisi kali ini menyajikan lima artikel, dan tiga resume hasil penelitian yang telah dilakukan oleh tim-tim penelitian yang ada di Pusat Penelitian Politik LIPI.

Artikel pertama berjudul **“Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pencapaian Cyber Security Melalui ASEAN Regional Forum on Cyber Security Initiatives”** yang ditulis oleh David Putra Setyawan dan Arwin Datumaya Wahyudi Sumari mencoba membahas tentang upaya Indonesia dalam memanfaatkan ASEAN Regional Forum (ARF) on cyber security initiatives untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam rangka mendukung keamanan nasional di bidang cyber. Kemajuan teknologi, terutama di bidang cyber telah membuat batas antarnegara menjadi semakin kabur. Hal ini memicu munculnya kejahatan dan ancaman nirmiliter di bidang teknologi bagi sebuah negara dalam bentuk ancaman cyber. Untuk menghadapi hal tersebut Indonesia memerlukan strategi untuk melindungi keamanannya. ARF menjadi salah satu forum yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mengajak negara-negara ASEAN dan negara mitranya untuk bekerja sama dalam

meningkatkan pertahanan dan menjaga stabilitas di kawasan.

Sumber daya manusia juga merupakan salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian khusus ketika kita berbicara tentang kesiapan Indonesia dalam menghadapi Komunitas ASEAN. Artikel yang ditulis oleh Fathimah Fildzah Izzati yang berjudul **“Membaca ‘PHK Massal’: Rantai Nilai Industri Elektronik, MEA, dan Tantangan bagi Gerakan Buruh di Indonesia”** mencoba melihat dampak pemberlakuan MEA bagi buruh-buruh yang ada di Indonesia. Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menyongsong MEA sempat menimbulkan isu “PHK Massal”. Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan peran gerakan buruh dalam menghadapi MEA, terutama dalam bidang industri elektronik.

Artikel berjudul **“Transformasi Ruang dan Partisipasi Stakeholders: Memahami Keterlibatan Masyarakat Sipil dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia dalam Proses Regionalisme ASEAN pasca-2003”** ditulis oleh Ahmad Rizky Mardhatillah Umar. Artikel ini menjelaskan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam dua sektor regionalisasi ASEAN, yaitu Hak Asasi Manusia (HAM) dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Sejak bertransformasi menjadi bentuk ‘Masyarakat ASEAN’ pada tahun 2003, mulai muncul interaksi yang lebih kompleks antara ‘negara’ dan aktor-aktor ‘non-negara’. Artikel ini berargumen bahwa Masyarakat ASEAN telah membuka ruang yang lebih besar untuk mengakomodasi partisipasi ‘pemangku kepentingan’/stakeholders yang ada di dalamnya.

Dengan adanya integrasi di kawasan ASEAN melalui implementasi Komunitas ASEAN, masyarakat yang paling merasakan dampak langsung keterhubungan dan menipisnya batas antarnegara melalui integrasi tersebut adalah masyarakat di perbatasan. Artikel berjudul **“Ketahanan Sosial Warga Perbatasan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN: Studi di Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat”** mencoba mengulas tentang sejauh mana kesiapan yang dimiliki oleh warga di wilayah perbatasan Indonesia dalam menyongsong

pemberlakuan Komunitas Ekonomi ASEAN. Artikel yang ditulis oleh Sandy Nur Ikfal Raharjo ini melihat ketahanan yang dimiliki masyarakat di Entikong melalui enam modal: modal alam, modal sosial, modal keuangan, modal politik/pemerintahan, modal fisik, dan modal manusia. Dari hasil analisis ini direkomendasikan bahwa pemerintah perlu melakukan reoptimalisasi kerja sama lintas perbatasan dengan negara lain untuk meningkatkan ketahanan masyarakat di perbatasan, dan perlu membuat aturankhusus untuk perdagangan lintas batas di dalam MEA.

Selain lima artikel di atas, *Jurnal Penelitian Politik* edisi kali ini juga menampilkan tiga resume penelitian yang telah dilakukan oleh tim-tim penelitian di Pusat Penelitian Politik. Resume penelitian pertama adalah mengenai perkembangan intelegen di Indonesia. Dalam ringkasan penelitian yang berjudul **“Intelejen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru”** yang disusun oleh Ikrar Nusa Bhakti dan Diandra Mengko Megaputri dibahas mengenai perkembangan dinamika intelegen Indonesia terutama pada masa setelah orde baru. Hasil penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang teori intelegen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia.

Tim Penelitian yang ada di Pusat Penelitian Politik LIPI pada tahun 2015 juga melakukan penelitian yang terkait dengan Komunitas ASEAN. Salah satunya adalah resume penelitian berjudul **“Problematika Kerja Sama Perbatasan Sepanjang Sungai Mekong antara Tiongkok dan ASEAN Bagian Utara”** yang disusun oleh Awani Irewati, dkk. Pada penelitian ini Tim Perbatasan Pusat Penelitian Politik LIPI melakukan penelitian tentang upaya pembangunan keterhubungan melalui kerja sama lintas perbatasan di sub-kawasan Sungai Mekong antara Tiongkok dengan lima negara ASEAN: Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Dalam kerja sama sub-kawasan ini, Tiongkok sebagai negara non-ASEAN menjadi salah satu penggerak aktif kerja sama *Greater Mekong Subregion*. Keterhubungan yang dilihat bukan hanya keterhubungan fisik saja, melainkan juga keterhubungan institusi dan keterhubungan masyarakat. Kerja sama sub-kawasan di ASEAN

sangat penting, terutama untuk mempersempit adanya gap perkembangan antara ASEAN bagian utara dengan negara anggota ASEAN yang lainnya. Dalam artikel ini juga dibahas mengenai peran kerja sama sub-kawasan di ASEAN dalam membangun keterhubungan yang akan mendorong kesuksesan implementasi Komunitas ASEAN.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal bahwa salah satu tantangan bagi Indonesia dalam melaksanakan Komunitas ASEAN adalah masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di Indonesia terhadap Komunitas ASEAN. Hal ini sesuai dengan hasil survey yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Politik pada tahun 2015. Dalam ringkasan penelitian terakhir berjudul **“Strategi Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN”** yang disusun oleh Khanisa, dkk dijelaskan bahwa kesadaran dan pemahamann publik menjadi faktor kunci yang menentukan apakah pilar-pilar yang telah disusun untuk mewujudkan Komunitas ASEAN dapat direalisasikan dengan baik. Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi yang ditunjukkan untuk Kementerian terkait. Strategi yang disarankan salah satunya adalah menekankan sebuah upaya berkelanjutan dan memiliki sasaran yang lebih nyata dalam melaksanakan program-program sosialisasi mengenai ASEAN dan Komunitas ASEAN kepada masyarakat.

Catatan redaksi kali ini kami tutup dengan ucapan terima kasih kepada segenap pihak yang telah berkontribusi sehingga *Jurnal Penelitian Politik* edisi kali ini dapat terbit. Terima kasih kami ucapkan untuk penulis, mitra bestari, serta tim pengelola jurnal. Semoga *Jurnal Penelitian Politik* ini dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah keilmuan dan praktis terkait dengan kajian mengenai ASEAN dan Komunitas ASEAN, serta dampaknya bagi Indonesia. Selamat membaca.

## Redaksi

---

**DDC: 324.2598**

**David Putra Setyawan, Arwin Datumaya  
Wahyudi Sumari**

**DIPLOMASI PERTAHANAN  
INDONESIA DALAM PENCAPAIAN  
CYBERSECURITY MELALUI  
ASEAN REGIONAL FORUM ON  
CYBERSECURITY INITIATIVES**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 1-20**

Perkembangan teknologi informasi di dunia internasional berdampak pada penggunaan ruang cyber yang mencakup semua aspek kehidupan nasional. Dihadapkan pada kondisi ini, pemerintah harus memahami kondisi cybersecurity di Indonesia dan membangunnya agar mampu mengatasi berbagai ancaman yang datang melalui ruang cyber. Selain kondisi internal, ruang lingkup eksternal perlu diperhatikan mengingat ancaman cyber yang bersifat transnasional, melewati batas kedaulatan, dan telah dipandang sebagai ancaman bersama oleh negara-negara di dunia. ASEAN telah menjadi salah satu wadah bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam rangka mendukung keamanan nasional di bidang cyber. Melalui ASEAN Regional Forum (ARF) on cybersecurity initiatives, strategi diplomasi pertahanan diarahkan untuk meningkatkan rasa saling percaya (confidence building measures) antar negara dan mengurangi potensi ancaman yang dapat ditimbulkan dari lingkup eksternal. Upaya tersebut, menghasilkan kesepakatan berupa point of contacts antar negara dan persamaan pandangan untuk terus mengadakan pelatihan cybersecurity dalam bentuk seminar maupun workshop untuk membangun kapasitas sumber daya manusia. Strategi dan upaya tersebut dianalisis melalui pendekatan kualitatif dan data-data primer dikumpulkan melalui

wawancara dengan 15 informan dari berbagai instansi pemerintahan. Selain itu, literatur, jurnal, dan dokumen terkait juga digunakan sebagai data pendukung.

**Kata Kunci:** ARF, confidence building measures, cybersecurity, diplomasi pertahanan

---

**DDC: 324.2598**

**Fathimah Fildzah Izzati**

**MEMBACA “PHK MASSAL”:  
RANTAI NILAI INDUSTRI  
ELEKTRONIK, MEA, DAN TANTANGAN  
BAGI GERAKAN BURUH DI INDONESIA**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 21-32**

“PHK Massal” sempat menjadi isu dalam politik perburuhan awal tahun 2016 setelah kemunculan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan dalam rangka menyambut keterlibatan Indonesia dalam MEA. Adanya konstruksi kata “massal” dalam isu PHK ini tidak sejalan dengan data ketenagakerjaan, namun lebih terkait erat dengan politik produksi dalam industri elektronik. Pada sisi lain, kerentanan gerakan buruh di sektor elektronik pun kian meningkat seiring dengan meningkatnya fleksibilitas pasar tenaga kerja dalam rezim pasar bebas, termasuk dalam konteks MEA. Tulisan ini membahas hubungan antara isu PHK massal dengan rantai nilai industri elektronik di tingkat global, MEA, dan tantangan bagi gerakan buruh di Indonesia. Tujuannya untuk menunjukkan peran gerakan buruh dalam menghadapi skema ekonomi seperti MEA terutama di dalam industri elektronik melalui analisis teori rantai nilai. Dengan menggunakan metode kualitatif berupa studi literatur, tulisan ini menemukan bahwa gerakan buruh di Indonesia memiliki

peluang yang besar untuk membangun kekuatan di tingkat regional dengan memosisikan dirinya di dalam rantai nilai global dan rezim pasar tenaga kerja fleksibel.

**Kata Kunci:** PHK Massal, Rantai Nilai Industri Elektronik, Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja, MEA, Gerakan Buruh

---

**DDC: 320.014**

**Ahmad Rizky Mardhatillah Umar**

**TRANSFORMASI RUANG DAN PARTISIPASI *STAKEHOLDERS*: MEMAHAMI KETERLIBATAN MASYARAKAT SIPIL DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH INDONESIA DALAM PROSES REGIONALISME ASEAN PASCA-2003**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 33-52**

Artikel ini mencoba untuk menjelaskan keterlibatan stakeholders tersebut dalam dua sektor regionalisasi ASEAN: Hak Asasi Manusia (HAM) dan Usaha Kecil & Menengah (UKM). Sejak bertransformasi menjadi bentuk ‘Masyarakat ASEAN’ pada tahun 2003, mulai muncul interaksi yang lebih kompleks antara ‘negara’ dan aktor-aktor ‘non-negara’. Sebelum 2003, ASEAN hanya diposisikan sebagai ‘organisasi internasional’ yang berpusat pada negara anggota sebagai satu-satunya aktor di kawasan. Menyusul diberlakukannya Masyarakat ASEAN pada tahun 2003, artikel ini berargumen bahwa Masyarakat ASEAN telah membuka ruang yang lebih besar bagi kontestasi antara negara dan ‘pemangku kepentingan’/ stakeholders yang ada di dalamnya, terutama kelompok bisnis (konglomerat dan UKM) serta organisasi masyarakat sipil. Dengan menggunakan perspektif kritis, artikel ini mencoba untuk menunjukkan bahwa sebetulnya pola interaksi yang terbangun antara aktor-aktor ‘non-negara’ dan ‘negara’ dalam spektrum Masyarakat ASEAN dimungkinkan oleh interaksi yang kian besar antara aktor-aktor yang ada di dalamnya, sehingga membuka kontestasi antar-stakeholders dalam organisasi regional yang telah bertransformasi. Hal ini kemudian memberikan pemahaman yang lebih kompleks tentang regionalisme di Asia Tenggara. Argumen tersebut akan dijelaskan melalui dua studi

kasus, yaitu aktivitas Organisasi Masyarakat Sipil HAM dan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia.

**Kata Kunci:** Regionalisme, Partisipasi, Pemangku Kepentingan, Masyarakat ASEAN, Asia Tenggara, Organisasi Masyarakat Sipil, Usaha Kecil & Menengah

---

**DDC: 320.014**

**Sandy Nur Ikfal Raharjo**

**KETAHANAN SOSIAL WARGA PERBATASAN INDONESIA MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN: STUDI DI KECAMATAN ENTIKONG, KALIMANTAN BARAT**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 53-68**

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah mulai diberlakukan pada akhir tahun 2015, dan akan ditransformasikan menjadi MEA yang inklusif pada tahun 2025. Sebagai penduduk kawasan perbatasan yang pintu gerbang lintas batas Indonesia-Malaysia, masyarakat Entikong harus memiliki ketahanan sosial yang kuat untuk menghadapi semakin bebasnya pergerakan orang dan barang di wilayah mereka. Tulisan ini mengkaji kondisi ketahanan sosial masyarakat Entikong dalam menghadapi MEA tersebut. Dengan menggunakan kerangka Sustainable Livelihood Approach yang dimodifikasi, tulisan ini mengidentifikasi bahwa masyarakat Entikong memiliki empat modal ketahanan sosial yang kuat, yaitu modal alam, modal sosial, modal keuangan, dan modal politik/pemerintahan, serta dua modal yang masih lemah, yaitu modal fisik dan modal manusia. Selain itu, ketahanan sosial masyarakat Entikong juga dibantu dengan pelaksanaan kerja sama lintas Indonesia-Malaysia. Tulisan ini menyarankan reoptimalisasi kerja sama lintas batas dan pengaturan khusus perdagangan lintas batas di dalam MEA.

**Kata Kunci:** Entikong, ketahanan sosial, kerja sama lintas batas, Masyarakat Ekonomi ASEAN



---

**DDC: 320.014**

**Ikrar Nusa Bhakti, Diandra Mengko**

**INTELIJEN DALAM PUSARAN  
DEMOKRASI DI INDONESIA PASCA  
ORDE BARU**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 69-82**

Intelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul “Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru”. Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat kerja-kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran intelijen.

**Kata Kunci :** Demokrasi, Intelijen, Indonesia, Politik, Pasca Orde-Baru

---

**DDC: 352.14**

**Awani Irewati**

**PROBLEMATIKA KERJA SAMA  
PERBATASAN SEPANJANG SUNGAI  
MEKONG ANTARA TIONGKOK DAN  
ASEAN BAGIAN UTARA**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 83-104**

Selama berabad-abad, sungai Mekong telah menjadi pusat kehidupan orang enam negara riparian ini. Secara geografis, mengalir melalui negara-negara tersebut untuk sekitar 4.900 km. Ini menciptakan sebuah DAS 795.000 km<sup>2</sup>, didistribusikan antara Upper Mekong River Basin yang terbentuk oleh China (21 persen) dan Myanmar (3 persen), serta Lower Mekong River Basin, yang terdiri Laos (25 persen), Thailand ( 23 persen), Kamboja (20 persen), dan Viet Nam (8 persen) (FAO, 2011). Untuk memenuhi kebutuhan orang-orang mereka sendiri di atas Sungai Mekong dan sub regional yang, negara-negara riparian telah mengembangkan beberapa inisiatif kerjasama lintas batas di antara mereka. Greater Mekong Subregion (GMS), Mekong Ricer Komisi [MRC] dll adalah contoh dari kerjasama lintas batas. Selain itu, ada beberapa kerjasama lain yang mencakup seluruh atau sebagian dari sub regional Mekong tetapi tidak secara khusus fokus pada Mekong River, yaitu ASEAN-China Free Trade Area dan Komunitas ASEAN. Kondisi ini menciptakan kompleksitas hubungan antara kerjasama di sub regional Mekong. Analisis tulisan ini beberapa potensi/masalah yang ada yaitu kemungkinan bahwa mereka kerjasama tumpang tindih; perbedaan profil negara-negara ‘tampaknya membuat kepentingan yang berbeda di antara mereka dll Analisis tersebut didasarkan pada beberapa penelitian lapangan di beberapa tempat (Vietnam, Laos, Thailand) pada tahun 2015.

**Kata kunci:** kerjasama lintas batas, negara-negara ASEAN Utara, RUPS, MRC, Sungai Mekong, konektivitas.

---

**DDC: 352.14**

**Khanisa**

**STRATEGI PENINGKATAN  
PEMAHAMAN MASYARAKAT  
TENTANG MASYARAKAT EKONOMI  
ASEAN**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 105-118**

ASEAN tengah merubah pendekatan institusinya dari top-to-bottom ke cara yang lebih memasyarakat. Penciptaan sebuah komunitas mendorong ASEAN untuk bersikap

lebih inklusif dalam implementasi program-programnya. Dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN, kesadaran dan pemahaman publik adalah faktor kunci yang menentukan apakah pillar ini akan dapat direalisasikan dengan sukses. Mengingat popularitas dari ASEAN dan kerangka-kerangkanya tidak diketahui secara signifikan di Indonesia, survei dan policy paper yang kemudian diterbitkan bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN yang mulai di terapkan tahun lalu.

**Kata Kunci :** ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, Indonesia, Survei Publik.

---

**DDC: 320.014**

**Nanto Sriyanto**

**NEOTRADISIONALISME DAN  
DISTOPIANISME: TINJAUAN ATAS  
TIGA BUKU ROBERT D. KAPLAN**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 119-136**

Artikel ini bertujuan menganalisa tulisan Robert D. Kaplan terutama yang terungkap dalam tiga publikasinya yaitu *The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the Post Cold War* (New York: Vintage Books. 2000), *The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate* (New York: Random House Publishing. 2013), dan *Asia's Cauldron: the South China Sea and the End of A Stable Pacific* (New York: Random House. 2014). Robert D. Kaplan dengan pendekatan geopolitik dan berlatar belakang sebagai wartawan yang mengalami langsung sejumlah perubahan penting pasca-Perang Dingin membawa pesan tentang negaran gagal yang mengancam stabilitas global, utamanya negara-negara maju (2000), kebangkitan pemikiran klasik geopolitik dalam dunia yang semakin padat dengan kekuatan yang terpolarisasi (2013), dan implikasinya terhadap kawasan Asia Timur sebagai kawasan yang rawan konflik. Dari ketiga publikasi Kaplan tersebut, penulis melihat pesan senada yang berwujud dalam bentuk bangkitnya pemikiran neotradisionalisme realis dalam hubungan internasional dan distopianisme. Di lain pihak, penulis juga melihat kekurangan dalam uraiannya yang populer dan menarik minat banyak pembaca dari kalangan luas, baik akademisi, aktivis LSM, bahkan pengambil keputusan, Kaplan terbilang tidak cukup mengupas

posisi teoritisnya dibandingkan teori yang ada yang menjadi diskursus akademik. Alih-alih memunculkan paparan yang holistik sebagaimana ia sebagai pengamat lapangan dan travel journalist menempatkan diri dalam setiap publikasinya, tulisan Kaplan harus dikritisi secara akademik karena tidak cukup utuh memberikan pandangan sebagaimana klaimnya yang banyak diungkap.

**Kata Kunci:** Robert D. Kaplan, geopolitik, realis neotradisionalisme, holistik, travel journalist

---

**DDC: 324.2598**

**David Putra Setyawan, Arwin Datumaya  
Wahyudi Sumari**

**INDONESIA DEFENSE DIPLOMACY  
IN ACHIEVING CYBERSECURITY  
THROUGH ASEAN REGIONAL FORUM  
ON CYBERSECURITY INITIATIVES**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 1-20**

*The development of information technology in the international world impacts to the use of cyberspace which covers all aspects of national life. Faced to this condition, Indonesian government needs to understand the state of cyber security and build it so that able to address any kind of threat which comes through cyberspace. In addition to internal conditions, the scope of the external noteworthy to be considered due the nature of cyber threats are transnational, cross the line of sovereignty, and has been seen as a common threat by the countries of the world. ASEAN has become a forum for Indonesia's to achieve national interests in order to support national security in the cyber field. Through the ASEAN Regional Forum (ARF) on cybersecurity initiatives, defense diplomacy strategy directed to increasing mutual trust (confidence building measures) between states and reduce any potential threats that may result from the external sphere. Those efforts, resulted in an agreement in the form of point of contacts between states and a shared vision for continuous training of cybersecurity in the form of seminars and workshops to build the capacity of human resources. Strategies and efforts are analyzed through a qualitative approach and primary data were collected through interviews with 15 informants from various government*

*agencies. In addition, literature, journals, and related documents are also used as supporting data.*

**Key Words:** *ARF, confidence building measures, cybersecurity, defense diplomacy*

---

**DDC: 324.2598**

**Fathimah Fildzah Izzati**

**THE "MASS LAYOFFS":  
ELECTRONICS INDUSTRY VALUE  
CHAIN, AEC, AND CHALLENGES FOR  
LABOUR MOVEMENT IN INDONESIA**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 21-32**

*"Mass layoffs" issue has been rising in labour's political discourse in Indonesia since early 2016, following the announcement of economic policy package to face the Asean Economic Community (AEC). However, the word "mass" constructed in the issue goes against the employment data and is more closely related to political interests related to production in the electronics industry. On the other hand, labour movement issue in the electronics sector is also emerging along with the increase of labour market flexibility in this free market era, including the context of AEC. This study discusses the relationship between the mass layoffs issue, the implementation of AEC, and the labour movement in Indonesia, as well as the value chain of the electronics industry on the global level. It aims to show the role of labour movement in facing an economic scheme like AEC especially in electronics industry using value chain theory analysis. By using qualitative approach and literature review, the study found*

that the labour movement in Indonesia has an excellent opportunity to build strength at the regional level by positioning themselves in the global value chain and flexible labour market regime.

**Keywords:** Mass layoffs, Value Chain, Electronics Industry, Labor Market Flexibility, AEC, Labour Movement.

---

**DDC: 320.014**

**Ahmad Rizky Mardhatillah Umar**

**SPACE TRANSFORMATION AND  
STAKEHOLDERS PARTICIPATION:  
UNDERSTANDING INVOLVEMENTS  
OF INDONESIAN CIVIL SOCIETY  
ORGANISATIONS AND SMALL AND  
MEDIUM ENTERPRISES IN POST-2003  
REGIONALISM IN ASEAN**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 33-52**

This article aims to explain the participation of stakeholders in the making of ASEAN Community after the regional political-economic transformation in 2003. The establishment of ASEAN Community, which is based on three pillars (politics & security, economics, social and cultural) has led to a more complex interactions between actors in the region. Before 2003, ASEAN has been perceived only as an 'international organisation', which is centered around the 'member states' as the only influential actor in the region. Following the establishment of ASEAN Community as a new form of regionalism in 2003, this article argues that the newly-established regional community has opened up spaces for contestations between the state and other new actors in the region, most notably business actors (both big businesses and small-and-medium enterprises) and civil society organisations. Drawn upon the critical perspective, this article argues that emerging interactions between actors in the region has been enabled by the transformation of space structure in ASEAN, that opened up spaces for contestations between stakeholders in the newly-transformed regional organisation. It thus leads to the more complex understanding of regionalism in Southeast Asia. The arguments provided will also be assessed by two case studies on the regionalisation of Human

Rights NGOs and Small-and-Medium Enterprises in Indonesia.

**Keywords:** regionalism, participation, stakeholders, ASEAN community, southeast asia, non-government organisations, small-and-medium enterprises.

---

**DDC: 320.014**

**Sandy Nur Ikfal Raharjo**

**THE SOCIAL RESILIENCE OF  
INDONESIAN BORDER AREA  
RESIDENTS TOWARDS THE ASEAN  
ECONOMIC COMMUNITY:  
A STUDY IN ENTIKONG SUBDISTRICT,  
WEST KALIMANTAN**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 53-68**

ASEAN Economic Community (AEC) was formally come into force at the end of 2015, and will be further transformed to be more inclusive by 2025. To deal with this issue, the residents of Entikong subdistrict at the Indonesia-Malaysia borderland should have a strong social resilience. This article explain the author's work on the social resilience assessment of the Entikong residents towards the AEC implementation. By using a modified Sustainable Livelihood Approach, the result shows that Entikong residents have four adequate social resilience assets, namely natural capital, social capital, financial capital, and political capital. Unfortunately, they are still weak on physical and human capitals. This work also shows that cross-border cooperation implementation gives positive effects to the residents. For recommendation, cross-border cooperation should be re-optimized and a special treatment of border trade in AEC should be arranged.

**Keywords:** Entikong, Social Resilience, Cross-border Cooperation, ASEAN Economic Community.

---

**DDC: 320.014**

**Ikrar Nusa Bhakti, Diandra Mengko**

***INTELLIGENCE AND  
DEMOCRATIZATION IN INDONESIA  
POST NEW-ORDER***

**Jurnal Penelitian Politik**

***Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 69-82***

*Intelligence is an important and also complicated topic to study and understand because of its nature of secrecy. However, democracy always pushes the people to have at least basic comprehension of all government agencies, including the world of intelligence. Along with that spirit, Center for Political Studies, Indonesian Institute of Sciences (P2P-LIPI) was conducting research entitled "Intelligence and Democratization in Indonesia Post New-Order" in 2015. This research not only discuss about intelligence theories, but also intelligence experience in transitional democracy states, brief history of Indonesian intelligence, and initial review on democratization of intelligence in Indonesia. We argue that intelligence reform in Indonesia is a requisite. Intelligence should operate under democratic system and principles. Oversight mechanism would not weaken intelligence role -in contrast, it would enhance intelligence professionalism by gaining public support, legitimacy, and adequate budget.*

**Keywords:** *Democracy, Intelligence, Indonesia, Politics, Post New-Order*

---

**DDC: 352.14**

**Awani Irewati**

***PROBLEMATIC BORDER COOPERATION  
ALONG THE MEKONG RIVER BETWEEN  
CHINA AND ASEAN NORTHERN***

**Jurnal Penelitian Politik**

***Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 83-104***

---

*For centuries, the Mekong river has become the center of six riparian countries's people life. Geographically, it flows through these countries for about 4,900 km. It created a 795,000 km<sup>2</sup> river basin, distributed between the Upper Mekong River Basin that is formed by China (21 percent) and Myanmar (3 percent), as well as the Lower Mekong River Basin, which comprised Laos (25 percent), Thailand (23 percent), Cambodia (20 percent), and Viet Nam (8 percent) (FAO, 2011). To fulfill their own people's needs over the Mekong River and its subregion, those riparian states have been developing some transboundary cooperation initiatives among them. Greater Mekong Subregion (GMS), Mekong Ricer Commission [MRC] etc. are examples of the transboundary cooperation. Besides, there are some other cooperations that cover the whole or part of the Mekong subregion but do not specifically focus on Mekong River; i.e. ASEAN-China Free Trade Area and ASEAN Community. This condition creates a complexity of relationships among the cooperations in the Mekong subregion. This paper analysis some potential/existing problems i.e. a possibility that those cooperations overlap; the differences in the countries' profile seem to create different interests among them etc. The analysis is based on some field research in some places [Vietnam, Laos, Thailand] in 2015.*

**Keywords:** *transboundary cooperation, Northern ASEAN countries, GMS, MRC, Mekong River, connectivity.*

---

**DDC: 352.14**

**Khanisa**

***STRATEGY TO INCREASE PUBLIC  
UNDERSTANDINGS ABOUT ASEAN  
ECONOMIC COMMUNITY***

**Jurnal Penelitian Politik**

***Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 105-118***

*ASEAN is gradually changing their approach from top-to-bottom to a more grassroots style institution. The idea of creating a community push ASEAN to be more inclusive in implementing its programmes. In realizing ASEAN Economic Community, public awareness and undertsndings is the key factor in whether the implementation of this ASEAN's pillar will succeed. Recalling that the popularity of*

*ASEAN and its frameworks are not significantly known in Indonesia, the survey and the policy paper that followed aim to find out the level of public understandings about ASEAN Economic Community which started to be implemented last year.*

**Keywords:** ASEAN, ASEAN Economic Community, Indonesia, public survey.

---

**DDC: 320.014**

**Nanto Sriyanto**

**NEOTRADISIONALISME DAN  
DISTOPIANISME: REVIEW FOR THREE  
BOOKS OF ROBERT D. KAPLAN**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 119-136**

*This article is to analyze three publications of Robert D. Kaplan, which consist of *The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the Post Cold War* (New York: Vintage Books. 2000), *The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate* (New York: Random House Publishing. 2013), and *Asia's Cauldron: the South China Sea and the End of A Stable Pacific* (New York: Random House. 2014). In those three publications, Kaplan utilizes geopolitical approach and embedded journalism in examining turbulent world in post-Cold War era. His arguments contain in the three books could be summarized as follows: failed states has threatened the stability the world, especially the prosperous developed countries (2000), resurgent of classical geopolitical thinking on tackling shrinking space yet polarized world politics (2013), implication on East Asia region as the volatile zone prone to conflict in the future. Based on the three publications, it could be seen that Kaplan is a proponent of neotraditional realism in IR studies, and it brings about dystopian thesis in those publications. Nevertheless it is discernible to note that despite his prosaic nature in almost of his writings that has attracted wider readership spread from academics, NGO's activists, and decision*

*maker, Kaplan has not given enough space to discuss his theoretical position before he comes up with single theoretical perspective. Therefore, instead of giving a holistic picture about his subject in those three publications, his arguments and thesis which he claims based on embedded journalism and field observation should be criticised due to imbalance description and short-sighted conclusion.*

*Key Words: Robert D. Kaplan, geopolitic, neotradisionalism realist, holistic, travel journalist*

**RESUME PENELITIAN**  
**STRATEGI PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG**  
**MASYARAKAT EKONOMI ASEAN<sup>1</sup>**

***RESEARCH SUMMARY***  
***STRATEGY TO INCREASE PUBLIC UNDERSTANDINGS ABOUT ASEAN***  
***ECONOMIC COMMUNITY***

**Khanisa, Tri Nuke Pudjiastuti, Zamroni Salim, Panky Tri Febiyansah, CPF Luhulima,  
Ratna Shofi Inayati, Emilia Yustiningrum, Atika Nur Kusumaningtyas,  
Faudzan Farhana, Pandu Prayoga**

Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI)  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10, Jakarta  
*e-mail*: khanisa\_krisman@yahoo.com

Diterima: 24 Mei 2016; direvisi: 22 Juni 2016; disetujui: 25 Juli 2016

***Abstract***

*ASEAN is gradually changing their approach from top-to-bottom to a more grassroot style institution. The idea of creating a community push ASEAN to be more inclusive in implementing its programmes. In realizing ASEAN Economic Community, public awareness and understandings is the key factor in whether the implementation of this ASEAN's pillar will succeed. Recalling that the popularity of ASEAN and its frameworks are not significantly known in Indonesia, the survey and the policy paper that followed aim to find out the level of public understandings about ASEAN Economic Community which started to be implemented last year.*

***Keywords:*** ASEAN, ASEAN Economic Community, Indonesia, public survey.

**Abstrak**

ASEAN tengah mengubah pendekatan institusinya dari top-to-bottom ke cara yang lebih memasyarakat. Penciptaan sebuah komunitas mendorong ASEAN untuk bersikap lebih inklusif dalam implementasi program-programnya. Dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN, kesadaran dan pemahaman publik adalah faktor kunci yang menentukan apakah pilar ini akan dapat direalisasikan dengan sukses. Mengingat popularitas dari ASEAN dan kerangka-kerangkanya tidak diketahui secara signifikan di Indonesia, survei dan policy paper yang kemudian diterbitkan bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN yang mulai di terapkan tahun lalu.

**Kata Kunci :** ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, Indonesia, Survei Publik

---

<sup>1</sup> Anggota tim terdiri atas penulis policy paper (Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, Zamroni Salim, PhD, Panky Tri Febiyansah, SE, M.IDEC, Dr. CPF Luhulima, dan Ratna Shofi Inayati, MBA) dan tim inti survei (RR. Emilia Yustiningrum, SIP, MA., Atika Nur Kusumaningtyas, M.Stat, Khanisa, SIP, MA, Faudzan Farhana, SH, Pandu Prayoga, SIP).

## Pendahuluan

Pada tahun 2003, kesepuluh negara Association of South East Asian Nations (ASEAN) melalui Konferensi Tingkat Tinggi ke 9-nya menyetujui terbitnya ASEAN Concord II. Dokumen ini meletakkan fondasi pembuatan tiga pilar ASEAN, ASEAN *Security Community*, ASEAN *Economic Community* dan ASEAN *Socio-cultural Community*. Pembentukan tiga komunitas ini adalah usaha ASEAN untuk mencapai integrasi yang lebih erat dan bermanfaat bagi negara-negara anggota sekaligus masyarakatnya.<sup>2</sup>

Dalam perkembangannya, ASEAN *Economic Community*, atau yang dalam tulisan ini akan selanjutnya disebut sebagai menjadi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), memiliki laju perkembangan yang signifikan dan tujuan yang terukur. Hal ini dapat terlihat pada adanya *Blueprint for the ASEAN Economic Community* (Cetak biru MEA) yang berhasil di finalisasi pada tahun 2007 dan pada tahun itu pula ditandatangani deklarasinya. Dalam deklarasi tersebut, disepakati mengenai penancangan terwujudnya MEA pada tahun 2015.<sup>3</sup> Cetak Biru itu sendiri meliputi empat skema kegiatan yaitu pembentukan pasar tunggal dan basis produksi, region ekonomi yang kompetitif, pembangunan ekonomi yang berkeadilan, dan integrasi ke sistem ekonomi global.

Kerjasama ekonomi regional seperti yang dirancang dalam kerangka MEA merupakan sebuah hal yang bertujuan untuk memberi keuntungan kolektif. Sebuah publikasi dari *Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* mengungkapkan bahwa kerjasama ekonomi regional dapat memberikan empat manfaat besar, antara lain meningkatkan kapasitas mereka berkompetisi dengan memperbesar pasar domestik dan kapasitas produksi, mengakses pasar luar negeri dan kesempatan ekspor yang lebih banyak, meningkatkan kemampuan untuk menghadapi tantangan baru, dan terakhir

menurunkan harga transaksi di perbatasan dan meniadakan halangan perdagangan.<sup>4</sup>

Bagi ASEAN, usaha untuk mencapai keuntungan kolektif sendiri telah dimulai bahkan ketika organisasi regional ini masih beranggotakan lima negara. Richard Stubbs menuliskan situasi perekonomian yang memburuk, tantangan perubahan ekonomi global dan perubahan sudut pandang dari *economic nationalist* ke *liberal reformers* mendorong ASEAN membentuk kesepakatan ASEAN *Free Trade Area* pada tahun 1992.<sup>5</sup> Akan tetapi, kerangka AFTA tersebut belum mampu membawa keuntungan yang nyata bagi perdagangan, khususnya intra ASEAN. Dalam melihat apakah kemudian MEA memiliki potensi untuk membawa ASEAN ke arah integrasi ekonomi yang lebih baik penting untuk melihat dua hal.

Pertama, ASEAN secara kolektif sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Menurut paparan Stephen Groff, Wakil Direktur Asian Development Bank, “Apabila ASEAN adalah sebuah negara, ASEAN berada dalam urutan ketujuh secara perekonomian, dengan total PDB sebesar 2,4 triliun dolar Amerika pada tahun 2013.”<sup>6</sup> Namun potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan untuk kepentingan internal di region. Hal ini dapat dilihat dari perdagangan intra ASEAN yang memiliki frekuensi jauh lebih rendah daripada perdagangan negara-negara ASEAN dengan mitra ekonominya. Menurut laporan yang disusun ASEAN, pada tahun 2013 walaupun mengalami kenaikan signifikan dari semenjak awal 1990-an, jumlah perdagangan intra ASEAN hanya mencapai 609 milyar dolar Amerika dibandingkan 1,9 triliun dolar Amerika yang didapat dari perdagangan ekstra ASEAN.<sup>7</sup>

<sup>2</sup> “Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II),” dalam [http://www.asean.org/?static\\_post=declaration-of-asean-concord-ii-bali-concord-ii](http://www.asean.org/?static_post=declaration-of-asean-concord-ii-bali-concord-ii), diunduh pada 1 Mei 2016.

<sup>3</sup> “Declaration on the ASEAN Economic Community Blueprint,” dalam ASEAN Economic Community Blueprint, <http://www.asean.org/wp-content/uploads/archive/5187-10.pdf>, diunduh pada 1 Mei 2016.

<sup>4</sup> United Nations, 2004. “Meeting The Challenges in an era of Globalization by Strengthening Regional Development Cooperation, Economic and Social Commission for Asia and The Pacific.” New York 2004. Halaman: 24.

<sup>5</sup> Richard Stubbs, 2000, “Signing to liberalization and the politic of regional Economic Cooperation,” *The Pacific Review*, 13 (2): 300-304.

<sup>6</sup> “Keynote speech: ASEAN Integration and the Private Sector-Stephen P. Groff,” 23 Juni 2014, dalam <http://www.adb.org/news/speeches/keynote-speech-asean-integration-and-private-sector-stephen-p-groff>, diunduh pada 1 Mei 2016.

<sup>7</sup> “ASEAN Community in Figures Special Edition 2014”, dalam [http://www.asean.org/storage/images/ASEAN\\_RTK\\_2014/](http://www.asean.org/storage/images/ASEAN_RTK_2014/)



Kedua, dari usaha integrasi ekonomi yang selama ini telah diambil, ASEAN belum berhasil memaksimalkan capaian yang diharapkan. Dalam tulisannya John Ravenhill mengungkapkan bahwa ASEAN bahkan tertinggal dari negara-negara MERCOSUR, organisasi subregional yang beranggotakan Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay, dan Venezuela, dalam hal keberhasilan integrasi ekonomi. Lebih jauh Ravenhill mengatakan, kegagalan ASEAN untuk mencapai target integrasi ekonomi di tingkat regional selama ini disebabkan oleh lemahnya basis institusi yang seharusnya mendorong integrasi ASEAN, dalam hal ini Sekretariat ASEAN, dan *non-tariff barrier* yang belum dijalankan dengan efektif.<sup>8</sup>

Dari kedua hal tersebut, dapat dilihat bahwa apabila ASEAN menginginkan MEA untuk berhasil lebih berhasil dari kerangka sebelumnya, negara-negara anggotanya harus meningkatkan pertumbuhan perdagangan intra-regional dan mengatasi kelemahan institutional di dalam tubuh mereka sendiri.

Pendekatan komunitas dalam MEA memberikan sudut pandang baru dimana ASEAN harus memastikan bahwa pembangunan ekonomi regional tidak hanya dibentuk oleh kebijakan-kebijakan elitis yang bersifat *top-down* namun secara inklusif mengikutsertakan masyarakat. Tentu saja hal ini merupakan tantangan yang cukup besar mengingat karakteristik ASEAN yang selama ini merupakan sebuah organisasi elitis.

Mengenai hal ini, beberapa survei telah mencoba mencari tahu tingkat pengetahuan masyarakat mengenai Komunitas ASEAN. Pertama, survei the ASEAN Foundation yang dikoordinatori oleh Eric Thomson dan Chulanee Thianthai.<sup>9</sup> Survei ini dilakukan di salah satu universitas di setiap ibukota negara ASEAN dengan menyasar mahasiswa sebagai responden.

---

ACIF\_Special\_Edition\_2014.pdf, halaman 8, diunduh pada 1 Mei 2016.

<sup>8</sup> John Ravenhill, 2008, "Fighting Irrelevance: an economic community 'with ASEAN Characteristics'," *The Pacific Review* 21 (4): 484-485.

<sup>9</sup> Eric C. Thompson dan Chulanee Thianthai, *Attitudes and Awareness Towards ASEAN: Findings of a Ten Nation Survey*, (Singapore: ISEAS, 2006).

Terdapat lima tema besar yang ditanyakan pada responden, yaitu sikap berkenaan dengan ASEAN, pengetahuan tentang kawasan dan ASEAN, orientasi terhadap kawasan dan negara-negara anggota, sumber informasi mengenai kawasan, dan aspirasi mengenai aksi dan integrasi di kawasan. Dari survei ini Thomson dan Thianthai menemukan bahwa secara umum para mahasiswa memandang ASEAN memiliki potensi lebih untuk berperan tidak hanya sebagai "talk-shop" namun juga tidak semua menyambut optimis ide mengenai "kewarganegaraan" ASEAN. Adapun optimisme tergambar pada jawaban responden negara-negara anggota baru yang tidak terlalu mapan, seperti Kamboja, Laos dan Vietnam.

Survei lainnya khusus menyasar Indonesia untuk mengetahui persepsi dan sikap masyarakat terhadap Komunitas ASEAN. Survei tersebut diadakan pada tahun 2011 oleh Guido Benny dan Abdullah Kamarulnizam. Survei ini dilakukan di lima kota di Indonesia, yakni Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, dan Pontianak serta memiliki responden dari masyarakat yang memiliki kualifikasi minimal setingkat diploma. Survei ini menemukan bahwa 96 persen responden mengatakan mereka mengetahui tentang ASEAN namun hanya 42 persen yang pernah mendengar mengenai ASEAN Community.<sup>10</sup>

Kedua survei ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran awal yang mengenai persepsi masyarakat tentang ASEAN. Namun karena keterbatasan lingkup responden kedua survei tersebut masih belum bisa dijadikan acuan. Khususnya untuk Indonesia yang memiliki keragaman tingkat pendidikan warga negara, tentunya survei yang terbatas pada lingkup warga terdidik masih harus diperluas respondennya.

## **Indonesia dan MEA**

Bagi Indonesia, MEA merupakan sebuah kesempatan untuk mengejar perkembangan perekonomiannya. Sebagai negara terbesar di ASEAN, secara ekonomi Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan Singapura dan Malaysia. Padahal Indonesia memiliki potensi sumberdaya

---

<sup>10</sup> Guido Benny and Abdullah Kamarulnizam, 2011, "Indonesian Perceptions and Attitudes toward the ASEAN Community", *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 30 (1): 46-51.

manusia dan sumberdaya alam yang sangat besar. Akan tetapi kedua potensi ini dapat dikatakan masih belum diberdayakan secara baik.

Dalam hal pengelolaan sumber daya manusia misalnya, Indonesia masih kesulitan menaikan kualitas pekerja untuk dapat bersaing dalam sebuah kompetisi ditingkat regional. Menurut data yang dari Survei Angkatan Kerja Nasional, Badan Pusat Statistik, tingkat pendidikan dominan terdapat dalam angkatan kerja adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.<sup>11</sup> Melihat data tersebut, tidak mengherankan apabila untuk tenaga kerja luar negeri tingkat pendidikan SD dan SLTP merupakan tingkat pendidikan dominan yang menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia pada tahun 2014 memiliki persentase 32,29 persen dan 37,86 persen.<sup>12</sup>

Pengelolaan sumberdaya alam menghadapi tantangan yang tidak kalah rumit. Selain dari belum tergarapnya infrastruktur yang baik untuk memaksimalkan pemanfaatan SDA, kerumitan birokrasi serta budaya korupsi, kolusi dan nepotisme, seringkali menjadi halangan yang lebih besar karena banyaknya pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

Terlepas dari kedua tantangan itu, MEA tetap merupakan sebuah kesempatan yang patut dimanfaatkan. Memastikan hal tersebut, Indonesia telah mempersiapkan kerangka hukum yang memayungi dijalankannya MEA sejak tahun 2008. Seperti yang dapat terlihat pada tabel 1, melalui berbagai instruksi presiden dan keputusan presiden, pemerintah telah berusaha membuat sistem untuk memastikan kesiapan Indonesia menghadapi MEA.

<sup>11</sup> "Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan jenis Kehiatan selama Seminggu yang lalu, 2008-2015," dalam <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1909> diunduh pada 1 Mei 2016.

<sup>12</sup> "Sepanjang 2014 BNP2TKI Mencatat Penempatan TKI 428.872 Orang," dalam <http://www.bnp2tki.go.id/read/9800/Sepanjang-2014-BNP2TKI-Mencatat-Penempatan-TKI-429.872-Orang.html>, dunduh pada 1 Mei 2016.

**Tabel 1.** Kerangka hukum Indonesia menghadapi MEA

2008	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009
2011	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi Association Of Southeast Asian Nations Tahun 2011,
2012	Keputusan Presresiden Nomor 23 tahun 2012 tentang Susunan Keanggotaan Sekretariat Nasional ASEAN
2014	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Association Of Southeast Asian Nations
2014	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi

Pada tahun 2008, di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, MEA telah terintegrasikan dalam fokus program ekonomi. Hal itu dilanjutkan dengan beberapa instrumen lainnya seperti penetapan komitmen untuk melaksanakan MEA dan pembentukan Sekretariat Nasional ASEAN di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri. Secara lebih khusus, pada tahun 2014 dibuatlah sebuah Keputusan Presiden yang mendasari pembuatan Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Keputusan Presiden tersebut menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai ketua komite nasional membawahi kementerian dan lembaga serta institusi terkait, juga forum pimpinan daerah. Dijabarkan pula, Kementerian Koordinasi bidang Perekonomian memiliki empat tugas yaitu koordinasi persiapan pelaksanaan, percepatan daya saing nasional, penyelesaian hambatan dan permasalahan, serta sosialisasi kepada pemangku kepentingan yang berkenaan dengan MEA.

Menurut pemaparan yang dilakukan oleh wakil dari kementerian koordinator bidang ekonomi, sosialisasi pada masyarakat merupakan sebuah hal yang dilakukan secara terus menerus.<sup>13</sup> Contoh yang sedang berjalan adalah pendirian Pusat Studi ASEAN di berbagai Universitas di Indonesia. Pemberian Informasi, edukasi, pemberian penjelasan dan konsultasi publik merupakan elemen dalam program *stakeholder*

<sup>13</sup> FGD, Tim Kajian Survei ASEAN, September 2015.

*engagement* yang dilakukan di bawah kerangka disemainasi MEA.

Langkah serupa juga dilakukan kementerian perdagangan yang meresmikan kantor AEC *Center* di gedung Kementerian Perdagangan pada akhir tahun 2015. AEC *Center* juga memiliki situs internet yang memberikan informasi bermfaat mengenai berbagai kesempatan perdagangan dan ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan masyarakat Indonesia dalam kerangka MEA.

Walaupun berbagai kegiatan kerangka hukum telah dipersiapkan dan program-program telah dijalankan, MEA masih menjadi kalimat yang asing tidak hanya bagi warga masyarakat diperdesaan tetapi juga diperkotaan. Hal inilah yang menjadi landasan diperlukannya survei untuk mengetahui seberapa jauh masyarakat memahami mengenai MEA. Pemahaman masyarakat ini bermanfaat tentunya bagi implementasi program-program MEA dimasa mendatang. Pemahaman masyarakat juga dapat membangun sebuah kekuatan nasional yang akan mendorong keberhasilan integrasi ekonomi di tingkat regional. Bagian selanjutnya akan menjabarkan proses dan hasil survei yang dilakukan di 16 kota di Indonesia. Melalui hasil tersebut, kemudian dirumuskan sebuah strategi yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap MEA.

## **Pembahasan**

Satu tahun sebelum MEA berjalan, sosialisasi mengenai MEA gencar diadakan oleh berbagai macam kementerian. Namun, sayangnya keberhasilan dari sosialisasi tersebut belum pernah diukur dengan sebuah instrumen yang ilmiah. Survei yang dikordinasikan P2P LIPI memiliki visi untuk mengisi jurang tersebut.

### **Sistematika survei<sup>14</sup>**

Survei “*Pemahaman Masyarakat terhadap ASEAN Economic Community*” 2015 merupakan survei publik yang mengukur tingkat pemahaman publik terhadap MEA dalam menghadapi

liberalisasi 12 *Priority Integration Sectors* (PIS). Adapun PIS yang saat ini menjadi fokus pemerintah Indonesia antara lain produk berbasis pertanian, produk otomotif, perikanan, produk berbasis karet, tekstil dan pakaian, pariwisata, serta produk berbasis kayu. Oleh karena itu, pemilihan lokasi survei dibatasi pada kota-kota di Indonesia yang merupakan basis produksi dari sektor-sektor tersebut. Terdapat delapan kota di Indonesia dipilih sebagai daerah utama penelitian, yaitu Medan, Kabupaten Bekasi (Cikarang), Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Manado, dan Denpasar. Selain daerah utama, juga ada daerah pembanding, yakni Jambi, Indramayu, Majalengka, Grobogan, Palangkaraya, Bangkalan, Mamuju, serta Kupang. Kebalikan dari daerah utama penelitian, kota-kota yang dipilih menjadi daerah pembanding merupakan kota-kota di Indonesia yang bukan merupakan basis produksi dari sektor-sektor yang telah disebutkan di atas. Dalam prinsip desain penelitian kuantitatif, daerah pembanding diperlukan sebagai upaya penyeimbangan unit-unit eksperimen (responden) dalam desain penelitian. Sehingga dalam survei yang dilakukan informasi yang diperoleh tidak hanya tingkat pemahaman publik mengenai MEA dari masyarakat yang tinggal dekat dengan kota-kota basis produksi sektor-sektor tersebut saja melainkan juga dari masyarakat yang tinggal di kota-kota yang sama sekali bukan merupakan basis produksi sektor-sektor tersebut.

Secara teori, semakin kecil margin error yang digunakan, semakin akurat data yang diperoleh. Konsekuensi dari semakin kecilnya *margin error* adalah jumlah responden yang diperlukan semakin banyak. Hal ini otomatis akan mempengaruhi jumlah biaya dan tenaga lapangan yang diperlukan. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka margin error yang digunakan dalam survei ini adalah 2 persen sehingga total responden survei menjadi 2.509 orang. Adapun yang menjadi responden dalam survei ini adalah masyarakat yang tinggal di daerah survei yang berusia lebih dari 17 tahun dan/atau yang telah menikah. Pembatasan usia ini dilakukan dengan dasar pertimbangan bahwa usia tersebut merupakan usia produktif sehingga seseorang telah dianggap

<sup>14</sup> Bagian sistematika survei sepenuhnya diambil dari rumusan sistematika survei yang dirumuskan oleh RR Emilia Yustiningrum, SIP, MA dan Atika Nur Kusumaningtyas, S.Si, M.Stat.

dewasa, dan bersentuhan langsung serta terkena dampak dengan adanya MEA. Kemudian, untuk menunjang analisis dari hasil survei, setiap surveyor bertanggungjawab untuk melakukan wawancara mendalam (*depth-interview*) dengan minimal satu pelaku usaha di wilayah kecamatan yang menjadi lokasi surveinya.

Pemilihan sampel dilakukan dengan menstratifikasi kecamatan terpilih menjadi kelurahan-kelurahan kemudian mengalokasikan sampel secara proporsional berdasar jumlah penduduk pada setiap kelurahan di kecamatan tersebut. Data jumlah penduduk merupakan hasil sensus penduduk tahun 2010 oleh Badan Pusat Statistik. Selanjutnya, pada masing-masing kelurahan didata seluruh Rukun Tetangga (RT) atau yang sederajat kemudian dipilih secara acak beberapa RT. Di masing-masing RT terpilih, didata kartu keluarga (KK) kemudian dipilih dua keluarga secara random. Pada survei ini pemilihan sampel juga memperhatikan komposisi gender, yaitu antara laki-laki dan perempuan dengan proporsi 50 : 50. Oleh karena itu, keluarga yang terpilih untuk disurvei kemudian didaftar anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan yang berada pada usia produktif dan/atau sudah menikah. Bila dalam keluarga pertama yang terpilih menjadi responden adalah perempuan, maka pada keluarga yang kedua di RT yang sama harus laki-laki yang didaftar.

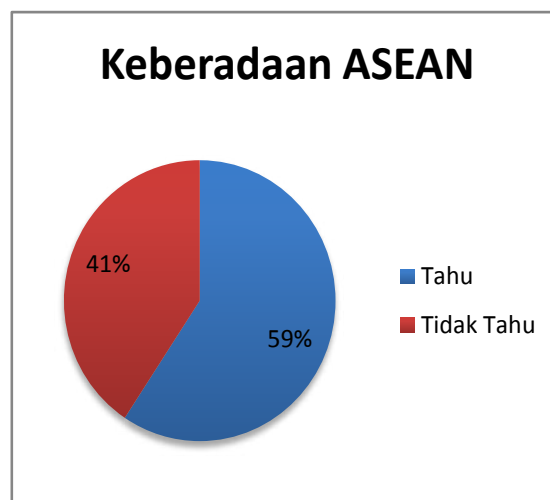
## Hasil survei

Menurut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, hasil survei yang dilakukan dapat di kategorikan menurut tiga kategori pemahaman. Pertama, “nice to know”, dimana responden mengetahui informasi dasar mengenai ASEAN dan MEA. Kedua, “need to know”, dimana responden memiliki pemahaman lanjutan mencakup implikasi dari MEA. Terakhir, “need to explore”, dimana responden mempunyai pemahaman penuh berkenaan dengan keberadaan dan implikasi MEA serta bagaimana memanfaatkannya.

### A. Kategori Nice To Know

Dari tujuh pertanyaan yang terdapat dalam kategori pemahaman dasar ini terdapat tiga pertanyaan mengenai ASEAN dan empat

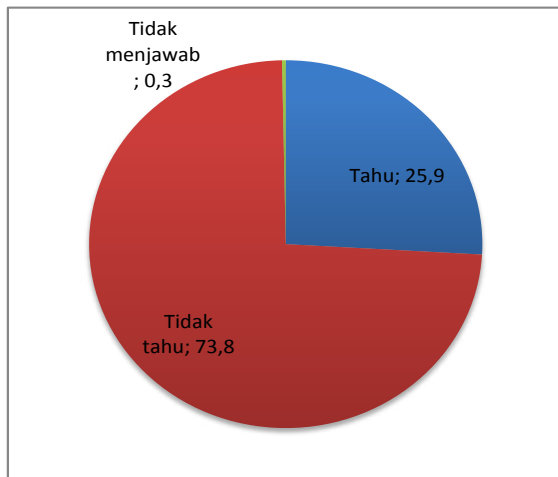
pertanyaan mengenai MEA. Dalam kategori ini, diketahui bahwa 59,7 persen dari total 2.508 pernah mendengar tentang ASEAN.



**Gambar 1.** Pengetahuan responden mengenai Keberadaan ASEAN

Namun saat responden ditanyakan mengenai negara-negara anggota ASEAN dengan angka walaupun 73,6 persen mengatakan mengetahui tetapi, ketika diminta menyebutkan secara spesifik terlihat bahwa pengetahuan responden mengenai ASEAN masih sangat kurang tepat. Hal tersebut dapat dilihat dari keluarnya nama negara-negara yang bukan negara anggota ASEAN seperti, Amerika Serikat, Jepang, Korea bahkan Arab Saudi.

Berbeda dengan pertanyaan dasar mengenai ASEAN yang mengindikasikan adanya pengetahuan yang cukup baik, pengetahuan mengenai keberadaan MEA tidak mencerminkan hal yang sama. Hanya 25,9 persen yang pernah mendengar tentang MEA dan sebagian besar mendengar informasi mereka berasal dari siaran televisi. Lebih jauh lagi dari persentase tersebut hanya 6,2 persen yang mengetahui bahwa MEA akan diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2015.



**Gambar 2.** Pengetahuan responden tentang keberadaan MEA (diambil dari jumlah yang mengetahui ASEAN)

### B. Kategori Need To Know

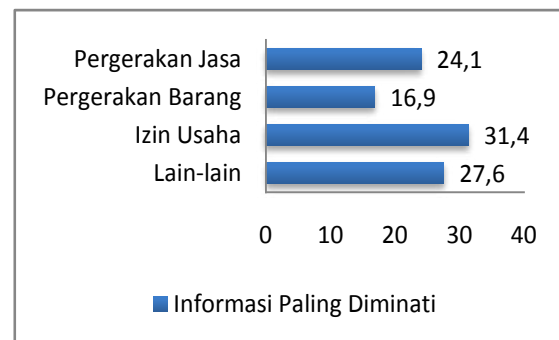
Kategori selanjutnya mencoba menggali dua tema besar yaitu, implikasi MEA dan pengetahuan tentang 12 sektor prioritas industri dan keterhubungan responden dengan keduabelas sektor tersebut.

Pertanyaan-pertanyaan dalam kategori ini berkisar antara sosialisasi MEA, prioritas informasi yang diminati responden, kebijakan-kebijakan MEA, refleksi keuntungan dari MEA, perihal ketenagakerjaan dan pendidikan, serta manfaat MEA dalam lingkup general dan nasional.

Dari pertanyaan-pertanyaan ini diketahui bahwa, hanya 1,7 persen responden pernah mendengar mengenai adanya kegiatan sosialisasi MEA dan dari jumlah tersebut hanya 8,9 persen yang pernah mengikuti kegiatannya. Menurut mereka, bentuk sosialisasi yang paling banyak disebutkan adalah seminar dan umumnya diselenggarakan oleh Pemerintah. Tentang frekuensi dari sosialisasi MEA, 65,8 persen responden tidak mengetahui seberapa sering sosialisasi diselenggarakan. Terakhir mengenai evaluasi dari sosialisasi yang diadakan, hanya sebesar 28,8 persen yang merasa paham serta 8,5 persen yang merasa lebih paham mengenai MEA.

Survei ini juga menggali informasi mengenai prioritas informasi tentang MEA yang diminati responden. Menurut peringkat prioritasnya,

informasi yang paling diminati adalah mengenai izin usaha (31,4 persen), pergerakan barang (16,9 persen), dan pergerakan jasa (24,1 persen).



**Gambar 3.** Informasi yang diinginkan responden dari sosialisasi MEA

Berkenaan dengan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan MEA terdapat tiga hal yang ditanyakan pada survei ini. Mengenai kebijakan, diketahui bahwa hanya 16,6 persen yang mengetahui bahwa terdapat kebebasan pajak impor yang diperoleh barang-barang dari negara ASEAN untuk memasuki Indonesia dan hanya 15,3 persen tahu bahwa ada kebebasan pajak impor yang didapatkan oleh barang-barang Indonesia yang akan memasuki negara ASEAN lainnya. Selanjutnya, mengenai kebijakan MEA yang mengizinkan semua negara ASEAN untuk bekerja sama memproduksi suatu barang juga hanya 17,6 persen responden yang menjawab mengetahui hal tersebut.

**Tabel 2.** Pengetahuan mengenai Kebijakan MEA

Kebijakan	Tahu	Tidak tahu
Penjualan barang ASEAN di Indonesia tanpa pajak impor	16,6%	83,4%
Penjualan barang Indonesia di ASEAN tanpa pajak impor	15,3%	84,7%
Kerjasama pembuatan sebuah barang oleh negara-negara ASEAN	17,6%	82,4%

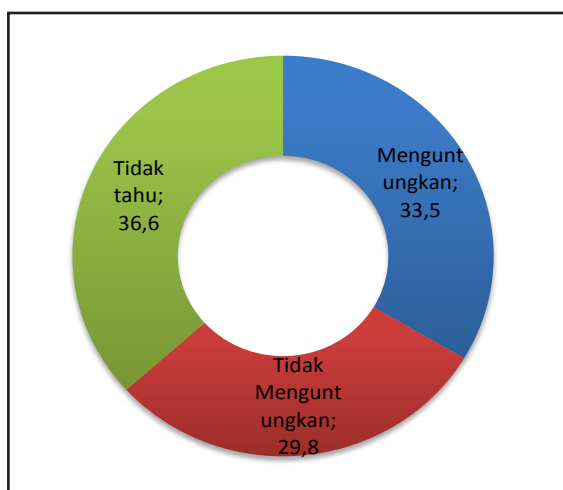
Tentang keterbukaan dalam pasar AEC yang menyebabkan banyaknya pilihan kualitas dan harga barang yang dijual di Indonesia (baik barang

dari Indonesia dan negara anggota ASEAN) 43,7 persen responden melihat keberlimpahan ini menguntungkan. Karena mereka merasa mendapat kemudahan mendapatkan barang, mendapat kualitas lebih baik, dan mendapat harga barang lebih murah.

Mengenai kebebasan beberapa profesi dan tenaga ahli asal Indonesia bisa bebas bekerja di seluruh negara ASEAN, hanya 17,4 mengetahui hal tersebut. Perihal tenaga ahli ASEAN yang bebas bekerja di Indonesia juga hanya 17,7 persen responden yang mengetahui. Informasi mengenai pendidikan minimal agar bisa bekerja sebagai tenaga ahli di negara-negara ASEAN selain Indonesia juga tidak diketahui dengan baik karena hanya sebanyak 14,7 persen mengetahui tingkat pendidikan minimal setingkat apa yang diperlukan.

Responden juga ditanyakan mengenai persaingan usaha di wilayah Bapak/Ibu menjadi lebih sulit dengan adanya MEA, 48,0 persen mengatakan usaha semakin sulit.

Mengenai mengenai keuntungan dan manfaat dari pemberlakuan MEA. Walaupun tidak terdapat ketimpangan yang terlalu jauh, pesimisme responden terhadap MEA dapat dirasakan dengan adanya 29,8 persen jawaban “tidak menguntungkan”. Jumlah responden yang dengan yakin menjawab bahwa MEA akan menguntungkan hanya 33,5 persen.



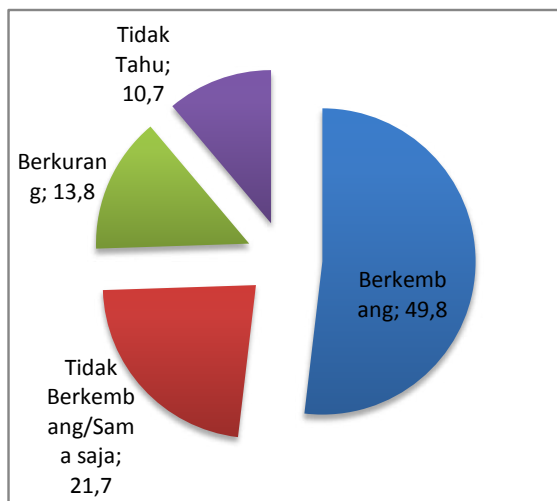
**Gambar 4.** Keuntungan dari keberadaan MEA

Survei ini kemudian menggali lebih jauh jawaban responden yang meyakini keuntungan MEA, dan menemukan bahwa harga yang lebih murah, akses pada produk barang dan jasa berkualitas sebesar dan meningkatnya lapangan pekerjaan. Menjadi keuntungan yang diperkirakan mayoritas responden. Menurut responden yang merasa MEA tidak akan menguntungkan, disebabkan oleh adanya pesimisme mendapatkan lapangan pekerjaan akibat rendahnya tingkat pendidikan sebesar, kesulitan bersaing yang akan dialami produk Indonesia menjadi kalah bersaing baik lokal maupun regional ASEAN sebesar, dan adanya gesekan nilai/norma/budaya masyarakat lokal dengan pendatang dan biaya hidup yang akan semakin tinggi/mahal.

Terlepas dari pesimisme diatas, 43,9 persen responden mengatakan bahwa MEA akan bermanfaat bagi Indonesia. Mayoritas responden berpendapat bahwa manfaat tersebut adalah berupa peningkatan ekonomi nasional, peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan, peningkatan hubungan baik dengan negara tetangga di lingkup ASEAN, peningkatan daya saing tenaga kerja, dan peningkatan stabilitas keamanan kawasan.

Mengenai 12 sektor prioritas industri, sayangnya sebesar 94,1 persen mengatakan tidak tahu. Walaupun mendapatkan hasil yang negatif, survei ini melanjutkan dengan menanyakan hal-hal yang lebih dapat dihubungkan dengan keseharian responden dalam tema ini seperti pengetahuan responden mengenai industri yang terdapat di wilayahnya. Ditemukan bahwa 38,4 persen responden mengatakan berada di wilayah yang memiliki industri berbasis pertanian dan 10,3 persen di daerah penghasil tekstil dan pakaian, sebesar 6,9 persen menyatakan berada di daerah produk otomotif, sebesar 6,7 persen mengatakan berada di daerah 6,7 persen, sebesar 6,5 persen mengatakan berada di daerah elektronik, sebesar 5,7 persen mengatakan berada di daerah pariwisata, sebesar 2,1 persen mengatakan berada di daerah produk berbasis karet, sebesar 1,6 persen berada di daerah produk berbasis kayu, sebesar 1,3 persen berada di daerah berbasis logistik, sebesar 0,4 persen mengatakan berada di daerah produk

kesehatan, dan 0,1 persen mengatakan berada di daerah berbasis e-ASEAN termasuk peralatan komunikasi dan telekomunikasi, sebesar 6,9 persen tidak mengetahui daerahnya berbasis apa. Mengenai perkembangan industri tersebut 49,8 persen responden mengatakan bahwa industri tersebut berkembang, 21,7 persen menjawab kondisinya stagnan atau tidak berkembang, 13,8 persen responden mengatakan berkurang dan sisanya mengatakan tidak tahu.



**Gambar 5.** Perkembangan Industri di Daerah Responden

Ketika ditelaah lebih jauh, perkembangan tersebut disebabkan oleh perbaikan akses dalam memasarkan hasil, infrastruktur/sarana fisik yang mendukung, kemudahan izin usaha, kemudahan mendapatkan kerja, adanya bantuan pemerintah sebesar, kemudahan mendapatkan bahan baku, dan bantuan dari perbankan

Masih berkenaan dengan dampak industri pada kehidupan masyarakat setempat, ditemukan bahwa, 55,3 persen responden mengatakan bahwa dengan adanya perkembangan industri wilayah mereka menjadi lebih baik. Sebagian kecil responden juga mengatakan mengenai adanya pelatihan yang berhubungan dengan industri di wilayahnya. Mayoritas menjawab pelatihan tersebut diadakan oleh pemerintah daerah. Bentuk pelatihannya meliputi pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, keterampilan menjahit/border/sablon, keterampilan bahasa asing/pemandu wisata, dan berupa keterampilan pengolahan hasil perikanan.

### C. Kategori Need to Explore

Kategori terakhir mencoba menggali respon individu atas MEA. Termasuk di dalamnya strategi untuk menghadapi diberlakukannya MEA, seperti orientasi dalam memilih barang dan perihal ketenagakerjaan.

Berkenaan dengan pilihan barang, survei ini menemukan beberapa hal, pertama, responden akan cenderung memilih produk Indonesia apabila barang-barang ASEAN and Indonesia, kedua, memilih produk Indonesia apabila barang-barang ASEAN lebih murah namun kualitasnya sama dengan barang Indonesia, ketiga, memilih produk Indonesia apabila barang-barang ASEAN lebih murah namun kualitas barang Indonesia lebih bagus, dan keempat, memilih produk ASEAN apabila barang-barang ASEAN lebih murah dan lebih baik dari barang Indonesia.

Mengenai ketenagakerjaan, ditemukan bahwa 41,5 persen responden sudah merasa siap bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari negara-negara ASEAN lainnya.

**Tabel 2.** Kesiapan Bersaing Responden

Kesiapan bersaing dengan tenaga kerja ASEAN	
Siap	41,5%
Tidak Siap	32,5%
Tidak Tahu	26,0%

Ketika ditanyakan strategi apa yang mereka butuhkan untuk menghadapi persaingan dalam MEA, menurut responden mereka mengunggulkan pelatihan keterampilan, (43,6 persen) dan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (20 persen), mencari informasi lowongan pekerjaan di negara-negara ASEAN (6,3 persen), mencari sertifikasi profesi (4,6 persen), mencari informasi agen penyedia tenaga kerja ahli di negara-negara ASEAN (2,8 persen).

Namun berkaitan dengan lapangan pekerjaan ini ditemukan bahwa minat mencari pekerjaan di negara-negara ASEAN selain Indonesia hanya dimiliki oleh 15 persen dari responden. Dari mayoritas jumlah yang ingin kerja di luar Indonesia (ASEAN) tersebut beralasan ingin mendapatkan penghasilan yang lebih besar (69,1 persen), mendapatkan pengalaman pekerjaan di

luar negeri (18,6 persen), menambah pengetahuan (7,2 persen), mendapatkan kesempatan hidup di luar negeri (1,3 persen), menjadi kebanggaan keluar (0,8 persen), masih ada hubungan keluarga (0,8 persen).

Mengenai upaya yang dilakukan responden untuk mendapatkan pekerjaan di negara-negara ASEAN, ditemukan bahwa responden memandang penting untuk meningkatkan jenjang pendidikan (35,4 persen), mengikuti berbagai pelatihan keterampilan (34,1 persen), mencari informasi lowongan pekerjaan di negara-negara ASEAN (14,8 persen), mencari informasi agen penyedia tenaga ahli di negara-negara ASEAN (7,6 persen), mencari sertifikasi profesi (3,9 persen).

Terakhir di bagian ketenagakerjaan, 53,2 persen responden tidak memperhitungkan MEA sebagai hal khusus yang harus disiapkan berkenaan dengan anak-anak mereka. Adapun 46,6 persen yang merasa mempersiapkan anak-anak mereka, 80,6 persen diantaranya menjawab persiapan itu dilakukan dengan melanjutkan pendidikan formal, 11,1 persen dengan mengikuti pelatihan keterampilan, 3,7 persen dengan mencari informasi lowongan pekerjaan di negara-negara ASEAN, 09 persen mencari informasi agen penyedia tenaga ahli di negara-negara ASEAN, 0,8 persen mencari sertifikasi profesi. Adapun tindak lanjut dari pelatihan khusus, 37,9 persen responden mengatakan akan digunakan sebagai modal untuk membuka usaha sendiri, 16, 1 persen mencari pekerjaan di wilayahnya, 10,7 persen mengajarkan pengetahuan atau keterampilan tersebut ke masyarakat sekitar, sebesar 8,4 persen mencari pekerjaan di luar wilayahnya.

### **Analisis dan Strategi**

Pemaparan hasil di atas membuktikan rendahnya pemahaman dan perhatian masyarakat terhadap MEA. Hal ini menunjukkan belum efektifnya berbagai langkah yang telah disusun sejak tahun 2008. Pertanyaannya kemudian mengarah pada dimana titik hambatan dan tantangan yang menyebabkan adanya jurang pemahaman yang begitu jauh mengenai MEA?

Melalui kajian lebih lanjut diketahui bahwa masalah-masalah yang terdapat pada kurang berhasilnya sosialisasi MEA merupakan hal yang sangat kompleks. Selain harus diakui bahwa masih terdapat tantangan koordinasi yang dialami kementerian dan lembaga bersangkutan pemerintah, adanya hambatan yang dialami pelaku usaha khususnya UKM dan sikap masyarakat yang masih pasif juga berkontribusi pada hasil yang ditemui dilapangan.

Dari segi tata pemerintahan, FGD yang dilakukan untuk memperdalam analisis atas hasil survei yang didapatkan, diketahui bahwa beberapa masalah seperti ketidaksinkronan pusat dan daerah. Berbagai kegiatan yang dilakukan cenderung bersifat sektoral dan tidak selaras antara pusat dan daerah. Dalam hal ini otonomi daerah memberikan tantangan tersendiri. Beberapa perwakilan dari kementerian mengakui bahwa adanya kesulitan menjalankan koordinasi antara pusat dan daerah karena kini pemerintah pusat tidak lagi memiliki kekuasaan penuh untuk menjalankan program-programnya di daerah. Kurangnya kantor dan perwakilan instansi menyebabkan sosialisasi sulit dilakukan.

Masalah lainnya juga terdapat pada hal-hal teknis yang mempersulit masyarakat, khususnya UKM. Beberapa hal yang menjadi keluhan antara lain adalah terdapatnya keluhan mengenai SNI yang dirasa mempersulit dan masalah tingginya suku bunga yang dirasa mempersulit UKM, serta masih kurangnya infrastruktur dan konektivitas khususnya di luar Pulau Jawa.

Terakhir, kesulitan untuk melakukan sosialisasi juga diakibatkan oleh adanya sifat pasif masyarakat. Mengingat ASEAN sendiri memiliki stigma elitis yang kurang diterima baik oleh masyarakat umum, tidak mengherankan apabila MEA juga belum menjadi sebuah kerangka yang menarik. Hal itu menyebabkan adanya keengganan untuk mengetahui MEA lebih jauh.

### **Rekomendasi kebijakan**

Melihat minimnya pemahaman masyarakat dan pesimisme yang tergambar dari hasil survei, serta masalah-masalah yang terjadi di level pemerintahan, tentunya diperlukan usaha yang



lebih maksimal dalam meningkatkan pemahaman tersebut.

Beberapa rumusan strategi dapat ditemukan pada policy paper yang dibuat atas dasar hasil survei dan pengamatan yang dilakukan di tingkat pemerintah melalui FGD. *Policy paper* ini khusus ditujukan bagi pemangku kebijakan dengan harapan walaupun MEA sudah diluncurkan pada 31 Desember 2015, namun usaha sosialisasi tetap dijaankan. Bahkan usaha sosialisasi ini harus digarap dengan lebih maksimal.

Tim Kajian Survei ASEAN merumuskan rekomendasinya dalam 3 kategori yaitu, tingkat kebijakan dan peraturan, tingkat relasi institusi dan tingkat teknis. Ketiga tingkatan ini merupakan gambaran yang didapatkan oleh tim mengenai akar permasalahan mengapa pemahaman masyarakat akan MEA masih rendah.

#### A. Tingkat Kebijakan dan Peraturan

Pesan dari kelompok rekomendasi ini adalah perbaikan fokus dan kebijakan mengenai MEA. Walaupun berbagai kebijakan yang dikeluarkan langsung dari presiden telah dikeluarkan semenjak tahun 2008, namun hubungan vertikal dalam struktur yang direncanakan belum secara baik terbentuk.

Poin pertama dari rekomendasi ini bahwa “Presiden RI tetap memosisikan Indonesia sebagai pendorong utama pelaksanaan Masyarakat ASEAN” melihat dari tren politik luar negeri Indonesia yang terkesan kurang memberikan komitmen pada ASEAN. Mengingat Indonesia adalah salah satu negara pionir ASEAN yang aktif dalam setiap kerangka diskusi, Indonesia harus mempertahankan komitmennya tersebut. Adapun perkembangan yang berkaitan dengan poin ini adalah terdapatnya sebuah *re-commitment* yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada awal 2016 yang mengatakan “ASEAN akan tetap menjadi cornerstone polugri Indonesia.”<sup>15</sup>

Poin kedua mengenai rekomendasi agar “Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi

memosisikan Indonesia agar tidak hanya menjadi pasar bagi produk ASEAN tetapi juga sebagai produsen yang mampu bersaing di pasar ASEAN” merupakan bentuk kekhawatiran tim pada apakah Indonesia mampu berperan aktif dalam kerangka MEA. Hal ini dikarenakan walaupun Indonesia kesulitan untuk berkompetisi akibat masalah-masalah di dalam negeri, tetapi dengan jumlah penduduk terbesar di ASEAN dan meningkatnya jumlah kelas menengah, Indonesia merupakan pasar yang menjanjikan. Sebuah laporan yang dikeluarkan World Bank pada tahun 2015 mengatakan konsumsi masyarakat memiliki porsi 55 persen pada total belanja Produk Domestik Bruto.<sup>16</sup>

Poin ketiga berkaitan dengan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi sebagai ketua Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Direkomendasikan untuk Kemenko Ekonomi untuk “memformulasikan kebijakan dan peraturan Rencana Aksi Nasional (RAN) dalam menghadapi MEA”. RAN diharapkan dapat menjadi cetak biru ditingkat nasional yang secara lebih rinci memaparkan tugas pokok institusi-institusi terkait dan capaian-capaian yang lebih nyata.

Poin ke empat berkaitan khusus dengan kementerian teknis yang menjadi salah satu garda depan dalam sosialisasi MEA. Direkomendasikan agar “Kementerian Perdagangan menjadi penggerak dalam gerakan sosialisasi terpadu melalui AEC Center.” Dalam memperbesar skala sosialisasi AEC center harus melakukan koordinasi dengan jaringan ASEAN *Study Center* yang telah dibangun di berbagai universitas. Selain itu, AEC *center* juga harus membuat kegiatan-kegiatan sosialisasi yang lebih mudah di cerna masyarakat umum.

Poin ke lima merekomendasikan “Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan kementerian terkait membangun strategi dalam rangka memperkuat daya saing PIS melalui peningkatan kualitas Produk yang dihasilkan, baik untuk industry berbasis sumber

<sup>15</sup> “Pernyataan Pers Tahunan Menlu RI 2016,” dalam <http://www.kemlu.go.id/id/pidato/menlu/Pages/PPTM-2016-Menlu-RI.aspx>, diunduh pada tanggal 2 Mei 2016.

<sup>16</sup> “Laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia, Juli 2015: Maju Perlahan,” dalam <http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/07/08/indonesia-economic-quarterly-july-2015>, dunduh pada 2 Mei 2016.

daya alam (kayu, karet, perikanan), industry manufaktur (otomotif), maupun jasa (pariwisata) dengan standar kualitas yang bersifat global”. Strategi yang secara khusus ditujukan pada PIS ini dimaksudkan agar Indonesia dapat mengusakan spesialisasi pada bidang-bidang unggulan untuk meningkatkan kapabilitas Indonesia dalam berkompetisi ditingkat regional.

Poin terakhir berkenaan dengan Usaha Kecil Menengah, direkomendasikan agar “Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan lembaga terkait memerhatikan posisi UKM dalam penerapan SNI oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap produk dalam negeri. Selain itu, pemerintah perlu mendorong pembangunan Standar Regional ASEAN atas dasar jejaring Standar Nasional dari negara-negara anggota ASEAN.”

### Tingkat Relasi Institusi

Kategori rekomendasi ini diperuntukan khususnya bagi masalah koordinasi yang terjadi secara vertikal maupun horizontal.

Poin rekomendasi pertama adalah untuk “Kementerian Luar Negeri memfungsikan dan mengaktifkan kembali Sekretariat Nasional ASEAN, khususnya Desk MEA.” Keberadaan Sekretariat Nasional ASEAN penting untuk menjembatani komitmen yang disetujui pada tingkat regional (ASEAN) dengan implementasi ditingkat nasional. Akan lebih baik apabila keberadaan sekretariat ini juga diikuti dengan pembentukan satuan/kelompok kerja khusus yang menangani ASEAN untuk memudahkan koordinasi antar institusi. Komitmen untuk secara regular mengadakan koordinasi antara kementerian luar negeri dengan satuan/kelompok kerja itu juga harus dijaga dan didukung oleh kapasitas finansial dengan penganggaran dana secara khusus.

Kemudian direkomendasikan pula bagi “Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi memperkuat Koordinasi antar kementerian dan lembaga secara vertikal dan horizontal dalam kerangka RAN sampai tingkat bawah sesuai tugas dan fungsinya”. Rekomendasi ini berkenaan dengan penguatan kesiapan Indonesia di level

domestik dimana Kemenko Perekonomian harus mampu mensinergikan langkah-langkah untuk mensosialisasikan dan mengimplementasikan MEA. Mengingat adanya kesulitan koordinasi dengan pemerintah daerah, RAN yang dirancang juga penting untuk menekankan pada koordinasi pada hubungan pusat dan daerah agar terbentuk kesamaan visi.

### Tingkat Teknis

Dalam rekomendasi teknis yang disusun, diharapkan adanya program-program yang lebih nyata dan secara langsung berdampak pada peningkatan pemahaman masyarakat terhadap MEA.

Poin pertama merekomendasikan “Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoptimalkan fungsi koordinasi sebagai “pusat komando” pelaksana MEA di Indonesia.” Hal ini berkaitan dengan poin terakhir di pada kelompok rekomendasi sebelumnya. Tentunya pusat komando ini harus diperkuat dengan dasar hukum yang lebih menjamin posisi mereka. Berkaitan dengan itu, maka Keputusan Presiden RI nomor 37 tahun 2014 tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN harus diperbaharui. Mengingat MEA sendiri sudah dimulai pada 31 Desember 2015, maka Keputusan Presiden ini harus diperbaharui. Setidaknya Kemenko ekonomi harus menjadi “komite nasional implementasi” dan bukan lagi “komite nasional persiapan”.

Rekomendasi berikutnya berkenaan dengan beberapa strategi khusus untuk mendukung UKM. Disarankan “Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta lembaga terkait mendorong pertumbuhan sektor riil, terutama UKM dengan meningkatkan akses kredit (subsidi suku bunga), stimulus non-kredit (kemudahan pengurusan SNI), dan pendampingan UKM.” Rekomendasi ini dirumuskan mengingat UKM merupakan salah satu pilar perekonomian Indonesia yang memiliki peran besar dalam pembangunan dan penguatan ekonomi domestik. UKM merupakan sektor penyerap tenaga

kerja terbanyak dengan lebih dari 8 juta orang bekerja di sektor tersebut.<sup>17</sup> Data ini menunjukkan banyaknya jumlah orang yang bergantung pada keberlangsungan UKM. Mengingat MEA sendiri merupakan sebuah kerangka yang menitikberatkan pada adanya keuntungan nyata yang langsung menyentuh masyarakat, maka penting untuk pemerintah memastikan adanya manfaat MEA yang secara nyata dirasakan melalui penguatan ekonomi ditingkatan dasar ini.

Berikutnya direkomendasikan pada “Kementerian Luar Negeri mengaktifkan dan menguatkan pusat-pusat kajian ASEAN.” Pusat Kajian ASEAN yang telah didirikan pada banyak universitas seringkali keberlangsungannya tidak diperhatikan dengan baik. Berkenaan dengan kerangka MEA yang tidak bersifat temporer maka sudah seharusnya pusat kajian ini bukan sekedar menjadi *gesture* simbolis. Adanya pusat kajian ASEAN dapat meningkatkan minat pada kajian ASEAN di universitas dan secara langsung menyampaikan isu-isu terkini melalui diskusi akademik.

Rekomendasi terakhir, dibutuhkan peran dari “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengintegrasikan pengetahuan mengenai ASEAN ke dalam kurikulum pendidikan sejak tingkat sekolah dasar.” Hal ini berkaitan dengan rendahnya peran kaum muda yang nantinya akan tumbuh pada masa diberlakukannya Komunitas ASEAN. Diharapkan dengan memasukan pengetahuan ASEAN sedini mungkin, generasi muda tersebut dapat memiliki rasa ownership akan ASEAN dan negan begitu akan memiliki ketertarikan lebih besar untuk ikutserta dalam kerangka-kerangka yang dirancang oleh ASEAN, seperti halnya dengan MEA.

## Penutup

Tantangan yang dihadapi Indonesia untuk dalam menghadapi MEA bukanlah hal yang mustahi untuk diatasi. Akan tetapi, segala kerumitan birokrasi, ketertinggalan infrastruktur dan kurangnya pemahaman masyarakat

membutuhkan aksi yang sinergis, khususnya dari pemerintah untuk mengatasinya.

Khususnya mengenai pemahaman masyarakat, berdasarkan strategi yang disarankan, penekanannya adalah untuk melakukan sebuah usaha yang berkelanjutan dan memiliki sasaran yang lebih nyata. Program-program yang dicanangkan harus berorientasi pada masyarakat dalam arti bukan hanya menyasar tetapi juga melibatkan masyarakat. Pelibatan inilah yang merupakan kunci peningkatan masyarakat pemahaman masyarakat karena sosialisasi MEA dengan hanya mengadakan diseminasi informasi tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan dibandingkan dengan ketika masyarakat secara langsung terlibat dalam kegiatan-kegiatan MEA.

## Referensi

### Buku

- Eric C. Thompson dan Chulanee Thianthai, *Attitudes and Awareness Towards ASEAN: Findings of a Ten Nation Survey*, (Singapore: ISEAS, 2006).
- United Nations. 2004. “Meeting The Challenges in an era of Globalization by Strengthening Regional Development Cooperation, Economic and Social Commission for Asia and The Pacific.” (New York: United Nations, 2004.)

### Jurnal

- Benny, Guido dan Abdullah Kamarulnizam, 2011, “Indonesian Perceptions and Attitudes toward the ASEAN Community”, *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 30 (1): 39-67.
- Ravenhill, John. 2008, “Fighting Irrelevance: an economic community ‘with ASEAN Characteristics’”, *The Pacific Review* 21 (4): 469-488.
- Stubbs, Richard, 2000, “Signing to liberalization and the politic of regional Economic Cooperation,” *The Pacific Review*, 13 (2): 297-318.

### Arsip digital

- “Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II).” Dalam [http://www.asean.org/?static\\_post=declaration-of-asean-concord-ii-bali-concord-ii](http://www.asean.org/?static_post=declaration-of-asean-concord-ii-bali-concord-ii). Diunduh pada 1 Mei 2016.
- “Declaration on the ASEAN Economic Community Blueprint.” Dalam *ASEAN Economic Community Blueprint*, <http://www.asean.org/>

<sup>17</sup> Data BPS tahun 2015 yang mengelompokan tenaga kerja usaha mikro dan usaha kecil. “Jumlah Tenaga Kerja Industri Mikro dan kecil Menurut Provinsi, 2013-2015,” dalam <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1005>, diunduh pada 4 Mei 2016.

- wp-content/uploads/archive/5187-10.pdf. Diunduh pada 1 Mei 2016.
- “Keynote speech: ASEAN Integration and the Private Sector-Stephen P. Groff.” Dalam <http://www.adb.org/news/speeches/keynote-speech-asean-integration-and-private-sector-stephen-p-groff>. Diunduh pada 1 Mei 2016.
- “ASEAN Community in Figures Special Edition 2014.” Dalam [http://www.asean.org/storage/images/ASEAN\\_RTK\\_2014/ACIF\\_Special\\_Edition\\_2014.pdf](http://www.asean.org/storage/images/ASEAN_RTK_2014/ACIF_Special_Edition_2014.pdf). Diunduh pada 1 Mei 2016.
- “Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan jenis Kehiatan selama Seminggu yang lalu, 2008-2015.” Dalam <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1909>. Diunduh pada 1 Mei 2016.
- “Sepanjang 2014 BNP2TKI Mencatat Penempatan TKI 428.872 Orang.” Dalam <http://www.bnptki.go.id/read/9800/Sepanjang-2014-BNP2TKI-Mencatat-Penempatan-TKI-429.872-Orang.html>. Diunduh pada 1 Mei 2016.
- “Pernyataan Pers Tahunan Menlu RI 2016,” Dalam <http://www.kemlu.go.id/id/pidato/menlu/Pages/PPTM-2016-Menlu-RI.aspx>. Diunduh pada tanggal 2 Mei 2016.
- “Laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia, Juli 2015: Maju Perlahan.” Dalam <http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/07/08/indonesia-economic-quarterly-july-2015>. Diunduh pada 2 Mei 2016.
- “Jumlah Tenaga Kerja Industri Mikro dan kecil Menurut Provinsi, 2013-2015.” Dalam <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1005>. Diunduh pada 4 Mei 2016.

## TENTANG PENULIS

### **Ahmad Rizky Mardhatillah Umar**

Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana di Department of Politics, University of Sheffield dengan Program Studi MSc in Politics with Research Method. Pernah bekerja di beberapa lembaga penelitian, serta melakukan beberapa aktivitas *freelance*. Selain menempuh studi pascasarjana, juga menulis kolom untuk beberapa media. Minat Kajiannya terletak pada keterkaitan antara Gerakan Sosial dan Politik Internasional, dengan isu spesifik pada Islam Politik, Masyarakat Sipil, Regionalisme, dan Politik Identitas. Aktif sebagai Ketua Divisi Kajian Lingkaran Studi Cendekia dan Wakil Ketua PCI Muhammadiyah Inggris Raya 2015-2017. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: armumar1@sheffield.ac.uk

### **Arwin Datumaya Wahyudi Sumari**

Penulis saat ini aktif sebagai analis Kebijakan Rencana Kontijensi Ekonomi dalam Kedeputian Politik dan Strategi, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Gelar Doktorat diperoleh dari Institute Teknologi Bandung, jurusan Teknik Elektro dan Informasi. Penulis juga pernah bergabung sebagai peneliti di Intelligent System Research Group (ISRG) dan Signal and System Laboratory (SSL) ITB. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: arwin.sumari@dkn.go.id atau arwin.sumari@yahoo.com

### **Awani Irewati**

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Internasional, Pusat Penelitian Politik-LIPI. S1 ilmu Hubungan Internasional diselesaikan di FISIP Universitas Airlangga, Surabaya. Gelar S2 diperoleh dari Asia and International Studies di Griffith University, Brisbane, Australia. Ia menekuni kajian utama tentang perbatasan antarnegara, khususnya perbatasan laut Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu juga melakukan kajian kajian perbatasan antara Thailand dengan negara-negara tetangganya,

serta mengkaji pendekatan konsep *connectivity* maupun *interconnectivity* di wilayah ASEAN dan sekitarnya. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: irewatiawani@yahoo.co.id.

### **David Putra Setyawan**

Penulis adalah pemerhati masalah diplomasi pertahanan nasional dan aktif sebagai Deputi Informasi dan Komunikasi dalam Lingkaran Studi Strategis. Gelar Magister diperoleh dari Universitas Pertahanan Indonesia, Program Studi Diplomasi Pertahanan. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: fa.davidsetyawan@gmail.com

### **Diandra Mengko Megaputri**

Penulis adalah peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI. Pendidikan S1 Hubungan Internasional diselesaikan di Universitas Katolik Parahyangan, sementara pendidikan S2 pada bidang ilmu Manajemen Pertahanan diselesaikan di Universitas Pertahanan Indonesia. Pernah aktif sebagai peneliti pada Indonesia Center for Diplomacy, Democracy, and Defense pada tahun 2012-2013. Minat kajiannya adalah isu-isu yang berhubungan dengan pertahanan, keamanan, Security Sector Reform (SSR), dan Industri Pertahanan. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: diandramengko@yahoo.com

### **Fathimah Fildzah Izzati**

Penulis adalah peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI, anggota redaksi *Indoprogress*, dan penulis buku *Politik Serikat Buruh dan Kaum Precariat: Pengalaman Tangerang dan Karawang*. Pendidikan S1 di bidang Ilmu Politik di tempuh di Universitas Indonesia. Penulis menekuni studi-studi yang berkaitan dengan isu ekonomi politik, buruh, perempuan dan politik. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: fildzah.izzati@gmail.com

### **Ikrar Nusa Bhakti**

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI). Gelar sarjana ilmu politik diperolehnya dari FISIP-UI dan gelar Ph.D di bidang Sejarah dan Politik dari School of Modern Asian Studies, Griffith University Brisbane, Australia. Beberapa kontribusi tulisannya antara lain termuat dalam buku *Tentara yang Gelisah*, *Tentara Mendamba Mitra*, *Bila ABRI Berbisnis*, *Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru* (Penerbit Mizan, Bandung), *The Fall of Soeharto*, *Human Security in Asia*, *Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki* (Pustaka Pelajar, Yogyakarta), serta di jurnal-jurnal ilmiah maupun surat kabar lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: [ikrar.lipi@gmail.com](mailto:ikrar.lipi@gmail.com)

### **Khanisa Krisman**

Penulis adalah peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI. Gelar S1 Hubungan Internasional diperoleh dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2010. Sementara pendidikan S2 jurusan Hubungan Internasional ditempuh di College of Asia and The Pacific, Australian National University. Ia menekuni studi-studi terkait perkembangan Information and Communications Technology (ICT), isu-isu cyber dan sosial media dalam Hubungan Internasional, serta isu-isu terkait regionalisme di Asia Tenggara dan ASEAN. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: [khanisa\\_krisman@yahoo.com](mailto:khanisa_krisman@yahoo.com).

### **Nanto Sriyanto**

Penulis adalah peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI. Gelar S1 Hubungan Internasional diperoleh dari Universitas Padjajaran. Sementara pendidikan S2 ditempuh di The University of Queensland, Australia, School of Political Science and International Studies. Ia menekuni studi-studi terkait perkembangan keamanan internasional dan kawasan, politik luar negeri Indonesia serta kajian teori hubungan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: [nantosriyanto@gmail.com](mailto:nantosriyanto@gmail.com)

### **Sandy Nur Ikfal Raharjo**

Penulis adalah peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI. Latar belakang pendidikannya adalah Ilmu Hubungan Internasional untuk S1 dan Resolusi Konflik untuk S2. Ia menekuni studi-studi pembangunan wilayah perbatasan, sengketa dan konflik perbatasan, serta isu-isu stabilitas keamanan regional. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: [sandy.raharjo@gmail.com](mailto:sandy.raharjo@gmail.com).

# Informasi Hasil Penelitian Terpilih

